



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 10 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Mardiyati

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (VII)

**Senin, 10 Januari 2022, Pukul 11.28 – 13.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maqdir Ismail
2. Ignatius Supriyadi
3. Annisa Eka Fitria
4. Lysa Permata Sari

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. I.G.A. Ayu Arisna Agustini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. R. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Aniko Juanda | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbud-Riset) |
| 10. Dian Wahyuni | (Kemendikbud-Riset) |
| 11. Polaris Siregar | (Kemendikbud-Riset) |
| 12. Rina Wirachmawati | (Kemendikbud-Riset) |
| 13. Dady Arhandy | (Kemendikbud-Riset) |
| 14. Husin | (Kemendikbud-Riset) |
| 15. Nita Mangalik | (Kemendikbud-Riset) |
| 16. Stivenly Christian Sumual | (Kemendikbud-Riset) |
| 17. Luthfi Dwi Hartono | (Kemendikbud-Riset) |
| 18. Harga Adi Prabawa | (Kemendikbud-Riset) |

C. Saksi dari Pemerintah:

1. Sutikno
2. M. Sofwan Effendi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Persidangan lanjutan untuk Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 agendanya adalah Mendengar Keterangan Saksi dari Presiden, ada dua orang, yaitu Prof. Dr. Sutikno dan Dr. Muhammad Sofwan Effendi. Dipersilakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahid mohon untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Kepada Saksi satu Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T. Sudah siap?

3. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:10]

Siap.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:10]

Kemudian Dr. Muhammad Sofwan Effendi, M.Ed. Sudah siap, ya?

5. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:15]

Siap. Sudah siap.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:19]

Juru sumpahnya sudah ada?

7. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:22]

Sudah ada.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:24]

Ya, silakan pada posisi berdiri, tangannya lurus ke bawah, ikuti lafal yang tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:27]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:04]

Baik, terima kasih. Silakan duduk Kembali!
Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [02:14]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.
Kita langsung mendengar keterangan Saksi Prof. Dr. Sutikno.
Silakan, Prof, waktu sekitar 10 menit.

12. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati. Mohon izin untuk menyampaikan hasil penilaian, pemeriksaan, dan validasi usulan atas nama Pemohon. Saya bagi menjadi dua, yang pertama, kronologi berkaitan dengan penugasan penilaian, kemudian yang kedua mengenai hasil penilaian itu sendiri. Hasil penilaian ini saya coba nanti bagi menjadi hasil pemeriksaan persyaratan, hasil penilaian unsur penelitian, dan hasil validasi.

Kronologi penugasan penilaian usulan guru besar atas nama Pemohon. Jadi kami ditugasi menjadi penilai ketiga, penilai pertama, penugasan pertama itu adalah pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan penilai yang ditugasi, beliau adalah Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah dari ITB dengan hasil penilaian bahwa syarat artikel jurnal internasional bereputasi tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2014, sehingga rekomendasinya adalah tidak disetujui. Dalam sistem aplikasi, kalau kita klik tidak setuju, maka rekomendasi yang muncul, yang terbaca di sistem adalah ditolak.

Kemudian dari ... kementerian dari ini ... apa ... sumber daya menugaskan untuk penilaian kedua, ya, untuk mencari second opinion, yaitu pada tanggal 25 Februari 2020 dengan penilai Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Si., dari Undip, dengan hasil penilaian sama, yaitu syarat artikel jurnal internasional bereputasi tidak memenuhi kriteria sesuai

dengan POPAK 2014. Jadi jurnalnya diskontinu, jurnalnya sudah diskontinu tahun 2004 ... 2017, artikel terbit tahun yang sama, yaitu tahun 2017.

Kemudian penilaian diberikan kepada kami sebagai penilai ketiga, pada periode penilaian 26 sampai dengan 27 Februari 2020 dengan hasil penilaian menurut kompetensi yang kami miliki. Bahwa karya ilmiah tersebut tidak sesuai dengan kriteria pada POPAK pada 2019 dan tidak memenuhi kriteria jurnal internasional bereputasi yang ada di (suara tidak terdengar jelas) 2014, ya. Jadi, syarat karya ilmiah yang ada ... sesuai dengan ketentuan pada POPAK 2014 itu harus memenuhi kriteria bahwa artikel ditulis sesuai dengan etika kaidah ilmiah dan etika keilmuan.

Kemudian yang kedua, unsur-unsur dari artikel itu harus lengkap, ya. Lengkap di sini harus meliputi juga latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar Pustaka, ini harus lengkap dan runtut, ya.

Kemudian yang ketiga, karya ilmiah harus mengandung kebaruan (novelty), ya. Pada karya ilmiah Pemohon, nampak kita jumpai beberapa temuan atau fakta. Yang pertama, ya, penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah itu juga tidak tepat, nanti banyak sekali, misalkan penulisan daftar pustaka tidak konsisten, kemudian banyak dijumpai ini ... apa ... pemilihan kosakata (vocabulary), ya. Jadi yang seharusnya, misalkan menggunakan kata *salesman*, salesman yang dalam hal ini sebagai subjek, ya, orang, ternyata hanya sales, ya. Sales itu kalau ... ini kan penjualan, tindakan menjual. Nah, ini hampir pada beberapa ... ini apa ... kalimat-kalimat itu keliru. Kemudian di dalam deskripsi tentang rumus, tentang probabilitas, probabilitas tentang ini ... apa ... tingkat ini ... apa ... probabilitas untuk pada ini ... apa ... pergerakan, pergerakan ini ... apa ... semut. Nah, itu juga keterangannya itu kurang ... kurang lengkap atau tidak sesuai dengan rujukan, kalau kita coba lihat di rujukan sumber ... sumber aslinya, ya.

Kemudian berikutnya, kemudian berkaitan dengan kecenderungan kompetensi Pemohon. Kalau kita lihat dari ini apa ... yang dimiliki oleh Pemohon, ini S1-nya itu memang matematika, kemudian S2-nya ilmu computer, beliau itu magister computer. S3-nya itu ilmu komputer. Ini pada departemen yang berbeda, ya, pada departemen yang berbeda. Kemudian judul disertasi beliau itu tentang *Conductivity Model Construction for* (ucapan tidak terdengar jelas). Ini sebenarnya merupakan penelitian untuk multidisiplin, multidisiplin antara kepakaran atau di dalam bidang ilmu komputasi, komputer, dan dalam bidang ilmu fisik. Karena yang dikaji adalah masalah bagaimana mengonstruksi sebuah model berkaitan dengan besaran konduktivitas yang ada di bumi, ya. Jadi konduktivitas yang ada di bumi secara ini apa ... secara vertikal, ini berbeda dengan yang secara horizontal. Kalau secara horizontal itu sama. Yang secara vertikal itu dipengaruhi oleh kedalaman.

Nah, pada penelitian disertasi Saudara apa ... Pemohon ini, kolega kami, dari Universitas Indonesia, nah ini merupakan interdisiplin atau multidisiplin dari kepakaran ilmu komputer dan ilmu fisika, fisika. Saya sendiri itu dari ilmu fisika. Kalau kita melihat dari komposisi tim pembimbing, tim pembimbing itu terdiri dari, dua, yaitu Drs. (ucapan tidak terdengar jelas), M.Sc., Ph.D., itu dari ilmu computer, kemudian Drs. Heru Suhartanto, ya, ini dari ilmu komputer, dan yang ketiga itu Dr. Eng. Yunus Daud itu dari ilmu fisika ... ilmu fisika UI. Jadi secara tim di internal UI sendiri menganggap bahwa disertasi dari Pemohon ini, kepakaran Pemohon, ini adalah merupakan interdisiplin, ya. Merupakan perpaduan antara disiplin ilmu komputer, komputasi, dengan disiplin ilmu fisika, khususnya geofisik.

Nah, latar belakang dari ini apa ... latar belakang dari pembimbing, Dr. Eng. Yunus Daud, ini juga background pendidikannya engineering, hampir sama dengan saya. Saya penugasannya di fisika, kemudian latar belakang saya juga doctor engineering, ya. Jadi ada kesamaan, ada kesepemahaman antara di internal UI dengan penugasan untuk penilaian di Dikti, ya.

Kemudian kalau kita melihat tim penguji disertasi yang bersangkutan. Itu juga komposisinya merupakan komposisi dari bidang kepakaran ilmu komputer, kemudian juga ada dari kelompok keahlian geothermal, nah ini bahkan dari fakultas teknik. Jadi, antara geofisika yang di fisika, kemudian yang ini apa ... geothermal di fakultas teknik dan pertambangan itu saling mendukung keilmuan tersebut, ya.

Nah, kemudian, berkaitan dengan syarat artikal jurnal internasional bereputasi. Tadi oleh dua penilai sebelum kami, itu memang dicermati di sana jurnalnya itu diskontinu, ya. Saya secara personal karena sudah melihat bahwa jurnalnya itu diskontinu, lebih memfokuskan pada kriteria dari karya ilmiah, ya, dimana karya ilmiah ini harus ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan, ya. Kalau kita melihat dari sekuensial atau keruntutan penyajian dari ini apa ... di dalam paper itu nampak memang kurang begitu sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria ada di POPAK 2014. Ya, misalnya kalau kita dilihat di metodologi, itu tidak jelas atau tidak diuraikan secara lengkap ... lengkap, detail, dan sekuensial atau terurut, dan sistematis, ya. Kemudian, kalau kita melihat di ini, daftar pustaka dari artikel yang diajukan untuk syarat khusus yang judulnya adalah *Solving Multiple Traveling Salesman Problem Using K-Means Clustering-Genetic Ant Colony System Algorithm*, ini dari sisi referensinya ada 12 referensi.

Kalau kita melihat dari ini ... apa ... dari 12 referensi tersebut, hampir semuanya adalah engineering, ya. Jadi, yang matematika itu tidak ada. Sehingga kalau karya ilmiah ini ditugaskan kepada ini ... apa ... penilik yang memang pakarnya engineering memang sudah sesuai, ya, sudah sesuai kalau kita melihat mau ... mau melihat kesesuaian dengan dengan rumpun ilmu, ini sudah sangat sesuai, ya, meskipun tidak ada ini

... apa ... kewajiban bahwa harus sama rumpun ilmunya. Ya, tentunya dilihat ada keterkaitan, atau kesesuaian, atau tidaknya.

Kemudian, berkaitan dengan ini ... apa ... dengan jurnalnya. Status jurnal ini sudah tidak terindeks Scopus, ya. Jadi, syarat atau kriteria jurnal internasional bereputasi pada POPAK tahun 2019 adalah ... yang terindeks adalah jurnalnya. Jurnal masih terindeks atau tidak pada database internasional dalam hal ini Scopus, ya.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan dari fakta yang telah kami ini ... apa ... laporkan berdasarkan hasil penilaian kami selama mendapat penugasan untuk penilaian atas nama Pemohon. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [14:09]

Ya, baik, terima kasih, Prof.

Lanjut, Pak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, silakan! Waktu sama sekitar 10 menit.

14. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [14:23]

Baik, assalamualaikum wr. Wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [14:24]

Walaikumsalam wr. wb.

16. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [14:24]

Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya Dr. Muhammad Sofwan Effendi (Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi). Saya diangkat selaku pelaksana tugas direktur sumber daya sejak 2 Januari 2020 dan ditetapkan sebagai direktur sumber daya sejak 26 Februari 2020. Sebagai direktur sumber daya, saya ditugasi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penjaminan mutu, fasilitasi bimbingan teknis, pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya pendidikan tinggi akademik, serta ketatausahaan di direktorat.

Terkait dengan layanan penilaian guru besar, kami konsentrasi pada layanan institusi. Artinya, usulan kenaikan jabatan akademik pangkat untuk jabatan lektor kepala dan profesor harus diusulkan oleh perguruan tinggi yang berjenjang, melalui prodi, melalui fakultas, melalui perguruan tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Ditjen Dikti Ristek, melalui laman pak.kemdikbud.co.id. Selanjutnya dilakukan verifikasi data dan

distribusi usulan sesuai bidang rumpun atau rumpun keilmuan untuk dilakukan evaluasi oleh tim penilai pusat.

Nah, selanjutnya terkait dengan waktu, ya. Jadi, kami punya norma layanan SLA (Service Level Agreement) di dalam SOP kami untuk penilaian lektor kepala itu maksimal 45 hari, hari kerja untuk di Dikti. Sedangkan untuk layanan penilaian profesor selama 55 hari kerja sampai ... sejak usulan kami terima, sampai ditetapkan angka kreditnya.

Nah, sesuai dengan ... terkait dengan materi yang sedang dibicarakan pada sidang kali ini, kami merujuk pada Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Nomor 1142 Tahun 2016, tanggal 9 Mei 2016. Bahwa menyampaikan imbauan ada ... agar pengusulan kenaikan jabatan akademik minimal 2 tahun sebelum batas usia pensiun. Sedangkan edaran yang terbaru dari Dirjen Dikti Nomor 166 Tahun 2020 bahwa usulan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan profesor minimal 1 tahun ... maaf, maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun dan itu berlaku sejak Januari 2021.

Terkait dengan materi berdasarkan dokumen yang ada pada direktorat sumber daya, dapat kami sampaikan kronologi usulan kenaikan jabatan akademik atas nama Pemohon sebagai berikut.

Pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik atas nama Pemohon diusulkan oleh Universitas Indonesia melalui laman pak.ristekdikti.go.id dengan Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S817/UN2.R/SDM.00.02/2019, tanggal 4 Oktober 2019 dengan melampirkan Berita Acara Surat Dewan Guru Besar dan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen atas nama Pemohon.

Yang kedua, usulan kenaikan pangkat menjadi profesor yang bersangkutan diterima melalui laman PAK Kemdikbud, tanggal 4 Oktober 2019. Sedangkan beliau lahir tanggal 25 Oktober tahun 1954, sehingga akan masuk di batas usia pensiun pada tanggal 25 Oktober 2019. Artinya, usulan masuk hanya 21 hari sebelum yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun, yaitu pada tanggal 1 November 2019. Kalau kita merujuk pada Surat Edaran Dirjen Diknya ... Dirjen SDID yang pertama yang berlaku di sejak 2016, maka ini tidak memenuhi imbauan Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti yang disarankan atau diimbau agar pengajuan guru besar minimal 2 tahun ... maaf, maksimal 2 tahun sebelum batas usia pensiun karena adanya proses review dan seterusnya.

Namun demikian, kami tetap melakukan penilaian usulan atas nama Pemohon pada periode penilaian, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sutikno, 3 kali penilaian, yaitu pada tanggal 22 Oktober, pada tanggal 25 Februari 2020, dan pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2020. Dan ketiga-tiganya tadi sudah dijelaskan, menyatakan belum menerima atau belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon selaku diajukan sebagai profesor.

Pada tanggal 8 November 2019, kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, yaitu Bapak Maqdir Ismail & Partners mengajukan keberatan atas keputusan panitia penilai pusat tanggal 22 Oktober yang tentang penolakan tersebut. Melalui Surat Nomor 121/NIP/IGS/11/2019 dan pada tanggal 10 Januari 2020, Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas penolakan tersebut. Berdasarkan rekomendasi dari Biro Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kami tetap melakukan penilaian karena kami berharap ini bisa diselesaikan di luar pengadilan. Oleh karena itu, kami menugasi dua orang reviewer lain, yaitu Prof. Saiful dan Prof. Sutikno. Dan ketiga-tiganya hasilnya sama.

Berikutnya, Pemohon melalui Universitas Indonesia sampai dengan 1 November tidak melakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan terhadap usulan dan saran perbaikan dari ketiga reviewer. Sehingga kami tidak bisa meneruskan usulan atas nama Pemohon kepada proses yang lebih lanjut, yaitu pada penetapan angka kredit maupun penetapan surat keputusan.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia Hakim, dari saya selaku Saksi Fakta dalam jabatan selaku direktur sumber daya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. Wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [21:29]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Saksi. Dari Kuasa Presiden, apakah ada pertanyaan apa pendalaman dari Keterangan Saksi? Dipersilakan.

18. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG [21:42]

Ya, mohon izin kami bertanya.

19. KETUA: ANWAR USMAN [21:58]

Ya, silakan.

20. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG [22:00]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin kami bertanya kepada Prof. Sutikno. Saudara Saksi, kami mohon penjelasan sebelum Saudara dan Tim Penilai PAK atas ... atas PAK Pemohon ditunjuk oleh Kemendikbud Ristek dalam hal ini Dirjen Dikti, apakah Saudara dan Tim Penilai PAK memiliki pengalaman yang sama dalam menguji karya ilmiah yang bidang ilmu sama dengan Pemohon?

Untuk Pak Sofwan, pertanyaan saya apakah Saudara mengetahui tentang gugatan Pemohon ke PTUN maupun perdata? Yang kedua, apakah Saudara mengetahui pengangkatan Tim PAK, ya, bagaimana

(suara tidak terdengar jelas) yang dilakukan oleh Dirjen Dikti dalam pengangkatan Tim PAK? Dan apakah Saudara juga mengetahui apa yang menjadi alasan pengusulan guru besar atas Pemohon ditolak atau belum disetujui? Dan berdasarkan ... terakhir dan berdasarkan pengalaman Saudara dalam pelaksanaan tugas, apakah Saudara dapat menjelaskan usulan kenaikan jabatan profesor dari fakultas Pemohon, yaitu Fakultas MIPA Universitas UI, ya, yang sudah disetujui dan apakah waktunya sesuai dengan himbuan Dirjen Dikti tersebut? Terima kasih. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih

21. KETUA: ANWAR USMAN [23:34]

Baik. Kemudian dari Pemohon, apakah ada pertanyaan? Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [23:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Maqdir Ismail. Saya akan mulai bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Sutikno, Yang Mulia. Yang pertama, yang saya mau tanya kepada Saudara Bapak Prof. Sutikno, pertanyaan saya yang pertama, apakah Saudara Saksi pernah membaca suatu hasil tulisan di tahun 1832 yang dikenal dengan nama the (suara tidak terdengar jelas), yaitu bicara tentang perjalanan seorang pedagang keliling di Jerman yang mengikuti ... yang (...)

23. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [24:41]

Suara tidak terdengar, Pak Hakim.

24. KETUA: ANWAR USMAN [24:49]

Ya sekarang sudah agak bagus, ya, seperti itu. Tadi kurang jelas. Diulangi saja! Mute! Mute!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [25:04]

Ya, apakah Saksi mengetahui bahwa ada perhitungan-perhitungan matematika yang dilakukan oleh pedagang keliling tersebut di Jerman tahun 1832? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apakah Saudara juga familiar dengan teorinya Manger yang diterbitkan tahun 1930 dengan hal yang sama, yaitu melakukan perhitungan jarak terdekat untuk pedagang keliling. Nah, pertanyaannya adalah apakah algoritma yang digunakan oleh Manger itu, tahun 1930-an itu, sama dengan paper yang Saudara nilai ini?

Kemudian pertanyaan saya selanjutnya masih berkenaan dengan itu, apakah Saudara juga melihat ada perbedaan algoritma yang dipakai atau yang digunakan oleh Hamilton yang dikenal dengan siklus Hamilton mengenai persoalan ini?

Yang selanjutnya, apakah Saudara juga melihat bahwa ada satu hasil yang ditulis oleh Julia Robinson dengan Project RAND tahun 1949 masih juga menggunakan algoritma yang sama?

Selanjutnya, Yang Mulia, yang saya ingin tanyakan kepada Saudara Saksi ini. Apakah Saksi mengetahui bahwa board of editor dari Far East Journal of Mathematical Science? Ini adalah para guru besar dari matematika dari India, Turki, Brazil, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat, dimana mereka menilai jurnal, telah menilai paper ini, sehingga bisa masuk dan diterbitkan dalam jurnal.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saksi menemukan ada reviewer lain yang mengatakan bahwa paper ini tidak layak digunakan untuk menjadi bahan atau syarat menjadi guru besar di MIPA, khususnya di matematika di UI?

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saksi mengetahui bahwa paper ini sebelumnya telah dinilai oleh dua orang guru besar matematika dari ITB, yaitu Profesor Irawati dan Profesor Edy Tri Baskoro yang mengatakan bahwa paper ini menurut mereka tidak bermasalah dan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat?

Selanjutnya, yang saya juga ingin tanya kepada Saudara Saksi, apakah Saksi juga menemukan ... karena di sini dikatakan bahwa penulisan tidak baik, penamaan persamaan tidak sistematis, dan seterusnya, seperti sudah disampaikan tadi. Pertanyaan saya begini, apakah Saudara Saksi ingin mengatakan bahwa board of editor dari Far East Journal of Mathematical Science tidak paham dalam melakukan penulisan?

Selanjutnya, apakah juga Saudara ingin mengatakan bahwa Profesor Irawati dan Profesor Edy Tri Baskoro sebagai guru besar matematika tidak cakap untuk memeriksa paper seperti ini ketika mereka sudah katakan bahwa paper ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat?

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa yang menerbitkan jurnal ini adalah the Pushpa Publisher, ya, yang sudah menerbitkan 17 jurnal di bidang Matematika?

Pertanyaan selanjutnya, apakah Saudara juga menemukan ada tulisan lain yang mengatakan bahwa tulisan ini memang tidak layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional, selain dari keterangan ketiga Saudara-Saudara yang tadi Saudara-Saudara sudah sebutkan?

Pertanyaan saya selanjutnya, saya baca keterangan Saudara yang mengatakan bahwa ini adalah sangat sederhana kalau kita lihat pada paper itu halaman 14-20, apakah dengan adanya constraint 6 pada halaman berikutnya, masih bisa Saudara katakan bahwa paper ini sangat sederhana?

Kemudian, apakah Saudara juga pernah menulis paper yang dipublikasikan di jurnal internasional mengenai masalah ini?

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam melakukan penilaian sesuai dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013, yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 4 orang anggota, dan siapa pula yang mewakili dosen? Karena tadi Saudara mengatakan bahwa hanya 3 orang yang melakukan pemeriksaan, yaitu Saudara Yanuarsyah, kemudian Sutikno, Saudara sendiri, dan satu lagi yang Saudara katakan itu tadi.

Pertanyaan saya selanjutnya. Apakah Saudara pernah mendengar bahwa Pihak Dikti pernah memanggil Pemohon untuk melakukan klarifikasi, ya? Tentu ini juga nanti saya akan tanyakan kepada Pak Sofwan Effendi karena sepanjang yang kami ketahui tidak pernah ada permintaan itu. Sementara kalau kita lihat dari POPAK itu sendiri bahwa ada kewajiban untuk meminta klarifikasi.

Selanjutnya pertanyaan saya adalah apakah Saudara pernah mendengar Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menawarkan agar supaya pada bulan Januari 2020, ya, agar supaya masalah ini tidak diteruskan urusan hukumnya, supaya segala tindakan-tindakan hukum dihentikan dan pada klien kami ini akan diberikan gelar guru besar melalui proses NIDK? Nah, pertanyaan saya adalah apakah Saudara mengetahui adanya alasan dari Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi menyampaikan hal ini kepada Dekan Fakultas Matematika Universitas Indonesia?

Pertanyaan saya terakhir kepada Pak Tikno, ya, apakah ... sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu tadi Saudara Saksi mengatakan bahwa disertasi daripada Pemohon itu diselesaikan di fakultas ilmu komputer? Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah Saudara mengetahui bahwa penelitian terhadap disertasi itu dilakukan di universitas lain, yaitu di Curtin University, sehingga ... dan itu adalah faculty of mathematics and computer science, ya, kemudian akhirnya karena ada satu masalah berhubungan dengan apa ... promotor yang meninggal dunia, ini kemudian dibawa ke Indonesia dan jadilah seperti yang Saudara katakan itu tadi? Saya tidak tahu apakah Saudara pernah membacanya atau tidak.

Nah, yang terakhir dari saya, Pak Tikno, ya. Apakah Bapak mengetahui bahwa ada satu pernyataan dari Pihak Scopus, setiap paper yang sudah diterbitkan dan ter-index Scopus, tidak ada pihak yang dapat mengatakan bahwa itu tidak terindeks Scopus? Karena ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia, karena ini kami jadikan Bukti P-4 di dalam Permohonan ini. Terima kasih, itu kepada Pak Tikno.

26. KETUA: ANWAR USMAN [35:27]

Ya, cukup ya? Ya, sekarang dari (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [35:34]

Sebentar, saya mau tanya kepada Saudara Sofwan.

28. KETUA: ANWAR USMAN [35:36]

Oh, ya, silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [35:37]

Pertanyaan saya begini, saya mulai dengan satu pertanyaan berkenaan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, ya. Pertanyaan saya begini, apakah Saudara Pak Sofwan pernah mendengar, ketika undang-undang ini dibicarakan di Kementerian Pendidikan ... di DPR oleh Pemerintah dan DPR, pada bulan November tahun 2005, ya, Pemerintah pernah menyampaikan atau mengajukan permintaan agar supaya pemeriksaan terhadap kenaikan pangkat untuk menjadi guru besar ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Karena kenapa saya tanyakan ini karena di dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Prof. Fasli Jalal yang mewakili pemerintah ketika itu, dikatakan bahwa best practice mengenai pengangkatan guru besar ini dilakukan oleh universitas. Itu pertanyaan saya yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 12, Pasal 10 di situ disebutkan adanya pembagian mengenai rumpun ilmu. Nah, kalau saya lihat di sini, matematika itu termasuk dalam rumpun ilmu formal, sedangkan dalam penjelasan teknik, termasuk rumpun ilmu terapan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ketika menunjuk tiga orang reviewer itu tadi, pihak kementerian melihat dan memperhatikan ketentuan yang disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini?

Kemudian pertanyaan saya selanjutnya yang ketiga, apakah penunjukan tim yang tadi dikatakan oleh Pak Tikno, masing-masing tiga orang secara sendiri-sendiri, ini dilakukan sesuai dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013? Seperti yang saya tanyakan tadi kepada Pak Tikno, ini harus ada satu tim.

Selanjutnya saya ingin juga bertanya, alasan penunjukan Saudara Prof. Yanuarsyah untuk menjadi pemeriksa pertama di dalam melakukan pemeriksaan terhadap paper ini, apakah betul bahwa sebelumnya telah ditunjuk Prof. Syafrizal dari Unand dan Prof. Rizky Rosjanuardi di dari UTI? Dua-duanya adalah guru besar di matematika, kemudian dibatalkan. Akan tetapi justru yang ditunjuk adalah Prof. Yanuarsyah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut pengetahuan Saksi, Saudara Prof. Yanuarsyah ini sudah cukup banyak menilai yang berhubungan dengan paper-paper yang ditulis oleh orang-orang

matematika? Karena sepanjang yang saya tahu, beliau ini adalah seorang guru besar elektro dari ITB.

Selanjutnya, apakah juga menurut Saudara ... menurut pengetahuan Saudara, Prof. Yanuarsyah ini juga sudah menjadi editor dari jurnal-jurnal di bidang matematika? Kenapa saya tanya soal ini? Karena di dalam satu paper yang disampaikan oleh Prof. Yanuarsyah, menurut beliau adalah sangat tidak benar apabila orang ahli menulis atau menjadi editor dari *Academic Journal Cancer Research* karena ilmunya tidak sama menurut beliau ketika itu.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa terhadap paper yang diajukan sebagai syarat untuk menjadi guru besar oleh Rektor Universitas Indonesia ini telah diperiksa oleh dua orang guru besar matematika di ITB, dari ITB, yaitu Profesor Irawati dan Profesor Edy Tri Baskoro yang mengatakan bahwa paper ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat?

Tadi juga disebut-sebut oleh salah satu di antaranya oleh Pak Tikno mengenai POPAK 2019. Kalau saya lihat pada halaman 52, misalnya ini ada syarat-syarat yang harus dilakukan, termasuk di antaranya adalah audiensi dengan memanggil pengusul dan pelaksanaan ... pelaksanaan banding. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Sofwan, apakah sampai dengan bulan Januari pernah ada pemanggilan baik kepada Universitas Indonesia maupun kepada Pemohon mengenai soal yang berhubungan dengan paper untuk kenaikan pangkat ini? Karena sepanjang yang kami tahu tidak pernah ada pemanggilan itu.

Yang karena faktanya adalah bahwa ada pemanggilan itu pada bulan Maret dengan pengundang, yaitu saudara Sofwan Effendi dengan dihadiri oleh beberapa orang dari Universitas Indonesia. Pertanyaan saya juga yang ingin saya tanya kepada Pak Sofwan, sebelum perkara ini bergulir ke PTUN, apa yang ... apakah Saudara mendengar ada pembicaraan atau pesan yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian melalui Dekan FMIPA UI agar supaya klien kami ini tidak meneruskan perkara ini ke PTUN, akan tetapi dia akan diberikan gelar melalui NITK?

Kemudian, apakah Saudara juga mengetahui bahwa pada tanggal 31 Januari, juga kepada klien kami ini ditawarkan kembali untuk menjadi guru besar, sepanjang tidak mempersoalkan persoalan ini melalui proses hukum dan harus melalui NITK?

Tadi menurut Saudara Pak Sofwan tadi, mengatakan ada ketentuan tentang waktu yang mulai berlaku sejak tahun 2015, yaitu mulai dari 50 hari, 2 tahun, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah Saksi mengetahui ... ya karena kami punya datanya, Yang Mulia. Bahwa salah seorang guru besar dari Universitas Indonesia yaitu Professor Doktor Jatna Supriatna menyampaikan ... permohonannya itu disampaikan, ini pada tanggal 19 Agustus 2015, kemudian ditetapkan sebagai guru besar tanggal 31 Januari 2016? Artinya, ini hanya beberapa hari saja, jadi tidak ... pelaksanaannya tidak seperti yang diterangkan

oleh Saudara Sofwan tadi. Ketika itu juga yang menyampaikan atau pengangkatan guru besar ini dilakukan oleh Profesor Ali Ghufron Mukti, yang kebetulan adalah menjadi dirjen pada saat ketika klien kami ini tadi mengajukan ... diajukan permohonannya untuk menjadi guru besar.

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saudara pernah mendengar bahwa salah seorang tim penilai PAK dari Universitas Indonesia, yaitu Profesor Usman Sumo Friend Tambunan dari FMIPA UI yang menerangkan dan menyampaikan pesan kepada Dekan FMIPA UI bahwa persoalan klien kami ini sudah selesai dan disetujui pengangkatannya sebagai guru besar sebelum tanggal 25 Oktober tahun 2019?

Selanjutnya, pertanyaan saya adalah apakah Saksi mengetahui bahwa Profesor Ali Ghufron Mukti, tahun 2015-2017, begitu juga Menteri Muhammad Nasir ... Mohammad Natsir, 2016, yang mengatakan bahwa masalah pengangkatan guru besar ini banyak bermasalah terutama di kementerian karena terlalu banyak persoalan-persoalan administrasi?

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saksi mengetahui bahwa PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen tidak mengatur adanya kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi terkait dengan kenaikan pangkat guru besar?

Dan apakah Saudara juga mengetahui bahwa PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen tidak (suara tidak terdengar jelas) tentang pengaturan adanya pelimpahan wewenang dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi kepada Kementerian Pendidikan dalam menentukan syarat kenaikan pangkat menjadi guru besar?

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saudara sebagai direktur sumber daya, apakah sudah mengetahui bahwa program bimtek yang saya lihat diterbitkan pada masa Saudara untuk menjadi guru besar di universitas-universitas anggota PAK dilakukan berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) undang-undang atau peraturan pemerintah? Apakah Saudara pernah mendengar adanya kegiatan bimtek untuk menjadi guru besar di Universitas Indonesia? Apakah betul bahwa kedudukan sebagai anggota bimtek dari Saudara Yanuarsyah di bidang engineering, begitu juga dengan Profesor Sutikno di bidang education engineering tidak dibidang matematika?

Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Saksi mengetahui bahwa The Pushpa Publisher menerbitkan paper klien kami ini juga menerbitkan sebanyak 17 jurnal di bidang matematika? Yang world of editor-nya dari India ... guru besar matematika dari India, Turki, Brazil, China, Jepang.

Pertanyaan saya selanjutnya yang ... ini yang sebelum saya akhiri, Yang Mulia. Di dalam keterangan tambahan yang disampaikan oleh Pemerintah ... Kuasa Pemerintah pada halaman 15 mengatakan begini, "Kekurangan penilaian tersebut bukan karena penunjukan tim penilai yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan karya ilmiah Pemohon, tetapi karena jurnal karya ilmiah Pemohon tidak memenuhi syarat penulisan oleh tim penilai."

Akan tetapi, di dalam duplik perkara yang tadi Saudara juga akan ditanya oleh Kuasa Pemohon, dalam ... dalam ... dalam duplik Perkara Nomor 5 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020, Kementerian Pendidikan itu menyatakan begini, ini pada halaman 12. Bahwa dalil penggugat tidak berdasar secara faktual dan seterusnya, dalam status cancel dinyatakan oleh ... dalam status cancel kurun waktu 2008 sampai 2017 dari FJMS. Artinya bahwa FJMS yang diterbitkan pada ... dalam periode 2008 sampai 2017, statusnya tidak lagi terindeks Scopus oleh karena karya ilmiah penggugat dipublikasikan dalam FJMS terbitan 2017. Maka artinya, karya ilmiah penggugat tidak lagi terindeks dalam Scopus. Mari berlogika awamlah jika penggugat naik pesawat dan tiba di bandara penerbangan di-cancel, apakah penerbangan tersebut ada? Maka, status jurnal yang di-cancel di Scopus sesuai dengan coverage, masa penerbitannya dianggap tidak terindeks Scopus.

Kemudian dilanjutkan pada halaman 12. Berdasarkan uraian tersebut, jelas dinyatakan bahwa manakala disematkan status cancel, berarti cancel atau coverage atas coverage pada masa yang dijelas ... jelas ditentukan dan dihapus dari database Scopus, maka role ini sama saja dengan tidak terindeks Scopus. Akan tetapi, satu penjelasan yang disampaikan oleh Pihak Scopus kepada kami (Bukti P-4). Bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa mengatakan satu paper yang sudah terindeks Scopus tidak lagi terindeks Scopus.

Kemudian, selanjutnya, yang saya mau tanya kepada Saudara Sofwan (...)

30. KETUA: ANWAR USMAN [53:03]

Ya, mohon ini waktunya dipersingkat, ya!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [53:06]

Saya dua pertanyaan lagi, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [53:09]

Ya, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [53:06]

Untuk yang ... ya, satu pertanyaan saya, apakah ketiga profesor, Prof. Yanuarsyah, Prof. Sutikno, Prof. Saiful Anwar memiliki pengalaman jadi editor di bidang Matematika? Ini menurut pengetahuan Saudara Saksi.

Kemudian terakhir pertanyaan saya, dalam keterangan tambahan halaman 14, diterangkan bahwa dosen yang bergelar Doktor di

Matematika UI itu, ada 15 orang, ya. Yang pertanyaan saya, saya ingin tahu, Saudara mendapatkan data itu dari mana? Karena data yang ada di Universitas Indonesia pada tahun 2019 itu ada 16 orang dosen di matematika bergelar doktor. 2020=17, dan 2021 sebanyak=19 orang.

Saya ingin menunjukkan bahwa data yang Saudara gunakan itu adalah tidak valid. Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN [54:21]

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim? Ya.

Baik untuk kedua Saksi, dipersilakan untuk menanggapi beberapa pertanyaan, dari Meja Hakim tidak ada pertanyaan. Prof. Sutikno terlebih dahulu. Silakan.

35. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [54:51]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Pemohon ... Kuasa Presiden, mohon maaf.

Yang pertama berkaitan dengan pengalaman saya di dalam penugasan penilaian pada bidang ilmiah sama, kami berkontribusi di dalam kegiatan penilaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah cukup lama sejak tahun 2016, ya.

Ada beberapa contoh yang bisa saya sebutkan, saya ambilkan dari tahun-tahun terbaru, yang melatarbelakangi keilmuannya hampir sama dengan kolega kami, yaitu dari Universitas Indonesia. Contoh yang pertama oleh kami dari jurusan matematika juga, dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), beliau adalah Dokter Mardiyah, ya, Dr. Dra. Mardiyah, M.T. Beliau adalah saat ini guru besar di departemen matematika. Kebetulan saya menjadi penilainya, usulan guru besar beliau. Kalau kita melihat dari latar belakang Ibu Mardiyah ini, S2-nya magister teknik, kemudian S3-nya teknik elektro. Nah, judul disertasinya itu juga tentang programming (pemograman) komputasi, di sini juga tentang numerik, ya. Jadi penghitungan numerik. Kalau kita melihat judulnya itu tentang penyempurnaan (modified) itu VSM, MC, dan seterusnya, ya. Aplikasinya untuk panel surya, beliau itu selain di ini tentang mathematical modelling, juga di control and sistem. Nah, usulan bidang penugasan apa yang diusulkan jadi senat akademi (suara tidak terdengar jelas)? Usulan bidang penugasannya adalah applied mathematics (matematika terapan). Karena ini hampir sama, hampir sama background-nya dengan ... ini dengan saya ini juga ... apa ... engineering. Kalau kita melihat dari usulan Saudara Pemohon, tentunya usulannya itu lebih cenderung ... condong mestinya ke applied mathematics (matematika terapan), bukan pure mathematics ataupun

traditional mathematics, matematika murni atau matematika tradisional. Saat ini perkembangan ilmu matematika itu sudah pada level applied, banyak pada terapan. Termasuk kalau kita lihat satu contoh di program master di Japan University, itu di sana sudah memfokuskan pada applied, applied mathematics. Jadi, program S2-nya sudah applied mathematics. Jadi, kalau diusulkan di ini ... apa ... matematika yang pure sementara background-nya itu lebih pada terapan, ini sebenarnya kurang sesuai, ya.

Kemudian contoh berikutnya, ada beberapa contoh yang pernah kami nilai. Contoh misalkan Dr. Citerma Lesmono, S.Si, S.E., M.T., M.Sc. Ini dari ini ... apa ... Universitas Parahyangan, ya. Beliau juga punya latar belakang magister teknik. Bekerja di Department of Mathematics Unpar, jurusan matematika. Kemudian Phd-nya di mathematics, University of Queensland, judul artinya ... judul disertasi yang beliau ini teliti, ini sebenarnya terapan, terapan pada bidang-bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini tentang join return policy for multiitem pericarpal dan seterusnya. Dari disertasi itu topiknya seputar apa kalau kita ambil secara ringkas? Itu sama juga tentang modeling, ya, pemodelan dan simulasi. Kemudian sistem aplikasi pemilu dan matematika ekonomi (economic mathematic). Diusulkan itu bidang ... ilmu penugasannya adalah matematika terapan. Nah, karena kedua usulan ini, nanti ada juga Dr. Nurdin dari Unhas itu sama juga, tidak saya sebutkan di sini, ada banyak contohnya. Dari yang saya periksa itu banyak memang mereka itu berkesempatan atau memang langsung menindaklanjuti revisinya, sehingga usulan guru besarnya memang sampai, ini approved, ya, dikabulkan oleh kementerian karena syarat-syarat yang ini ... apa ... harus dipenuhi itu sudah dipenuhi semua.

Kemudian berkaitan dengan ini, pertanyaan dari Kuasa Pemohon. Yang pertama, sebenarnya kalau saya lihat dari tadi sebelum fokus pada pertanyaannya, beliau menceritakan tentang paper-paper yang berkaitan atau sebagai rujukan tentang penelitian yang berkaitan dengan papernya dari Saudara Pemohon, yaitu mengkaji tentang bagaimana mengoptimasi pergerakan dari sales. Jadi, sales ini, misalkan dalam sebuah company, dalam sebuah perusahaan, itu kan banyak, ya, bagaimana mengoptimasi pergerakan sales-sales ini, mendistribusikan barang, ada ... bagi kota, ya, dengan kota awal yang tertentu ditentukan, ya, misalkan disebut dalam papernya sebagai deport, kemudian bagaimana mengoptimasi? Ini sebenarnya yang dikaji adalah ilmu mengoptimasi, memodelkan melalui pemodelan matematika atas kasus, problem, how to optimize multiple travelling salesman problem. Jadi, persoalan pergerakan sales, banyak sales ganda, bukan hanya satu sales pada banyak kota. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini?

Nah, pada beberapa ilmu, berbagai ilmu, ya itu bukan hanya di matematika saja, di almagentic, ya, di almagentic itu juga merekap, mengambil fenomena dari genetika tentang kromosom itu, ya,

pertumbuhan dan perkembangan tentang kromosom, kemudian muncul namanya Genetic Algorithm Optimization, ya, GAC. Ilmu ini adalah ilmu multidisiplin. Pada paper yang disampaikan ... ditulis oleh Pemohon dipublikasikan, beliau juga menjadikan paper ini sebagai referensi.

Kemudian, pada ilmu-ilmu yang lain, pada biologi, ya, fenomena pergerakan semut, ya, semut itu kalau akan mencari makan, dari tempat sarangnya, asalnya, mencari makan, semut ini mengeluarkan zat yang disebut dengan feromon, feromon itu di paper juga disebutkan. Nah, untuk mengoptimasi pergerakan semut itu juga sudah di-modeling, di ... apa ... dioptimasi. Nah, ilmu tentang modeling, mengoptimasi jarak yang ditempuh oleh semut yang di awalnya itu ditulis oleh Dorino, ini juga bisa diterapkan untuk mengoptimasi bagaimana pergerakan sales ini, ya, pergerakan sales ini akan mencapai jarak yang optimum. Tujuan akhirnya adalah bagaimana meminimalkan cost, ya, cost dari distribusi pengiriman barang ini. Nah, jadi ada misalkan tentang genetic algorithm tadi, dari tentang genetik, itu sudah puluhan, kalau kita search misalkan pakai Google ataupun di database (ucapan tidak terdengar jelas) itu sudah ratusan, kita bisa cari, bukan hanya dari paper-paper yang tadi disebutkan oleh Kuasa Pemohon, kami sudah baca, ya, kami sebagian, sebagian.

Kemudian, dari genetic algorithm itu juga sudah banyak. Kemudian berikutnya, selain itu selain tentang genetic algorithm itu juga ada clustering, ya, clustering optimization method dari banyak kota-kota ini untuk meminimalkan atau memudahkan perhitungan, itu bisa dibuat klaster-klaster, ya, kemudian dari dalam satu klaster dibuat sentroid. Nah, ilmu ini sebenarnya sama, itu ilmu di dalam fisik, ya, kalau kita misalkan mau mengambil titik pusat sebuah kesetimbangan massa itu ada center-nya di situ. Jadi, ilmu itu juga ilmu diambil dari ... dari ilmu biologi tentang genetik, kemudian ilmu dari ekonomi, kan ini ... apa ... tentang bagaimana sales ini mengoptimasi pergerakan sales. Kemudian, ilmu tentang matematika juga, ini interdisipliner, ya. Jadi, berkaitan dengan referensi yang ini ... apa ... telah kami baca cukup banyak, ya.

Nah, permasalahan justru bisa kita ini ... apa ... menjadi bahan pertanyaan para penilik. Kalau sudah banyak penelitian, sudah banyak penelitian yang tadi disampaikan oleh Kuasa Pemohon dan kami sudah baca juga, ya, kenapa itu tidak menjadikan reference, dasar reference, ya? Kalau itu dijadikan dasar reference, maka tulisan yang dipublikasikan atau penelitiannya akan bisa memenuhi syarat tentang novelty kebaruan. Karena reference-nya ini lemah, hanya 12, 12 itu pun yang artikel dari jurnal internasional bereputasi itu cukup sedikit, ya. Bisa kita coba lihat di sana, ya, yang lain hanya text book, ya, buku yang itu sudah lama.

Jadi yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon, itu kalau masuk pada reference, itu akan sangat (ucapan tidak terdengar jelas). Karena apa? Karena akan bisa memetakan. Sebenarnya hal novelty baru yang

ada apa di situ? Kalau kita melihat di sini tentang cluster genetic algorithm, kemudian genetic algorithm optimization, dan ant colony system optimization, ini sudah dikasih banyak orang. Nah, ini tentunya kesulitan.

Nah, kemudian (...)

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:21]

Prof, Prof.

Mohon maaf, Pak Ketua.

Prof. Tikno, mohon maaf, ini dari Meja Hakim. Bisa didengar, ya? Saya mau ambil kesempatan di tengah ini sebelum semuanya selesai dijawab.

Nah, artinya kan sekarang reviewer menilai ulang hasil penilaian review sebuah ... apa ... reviewer sebuah jurnal. Bukankah begitu yang lakukan?

37. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:05:48]

Terima kasih, Yang Mulia (...)

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:51]

Eggak, belum. Pertanyaan saya dijawab singkat saja. Ini kan tulisan ini, Pak Prof. Tikno. Ini tulisan A ... si A sudah dimuat di jurnal yang bereputasi terindeks Scopus dan segala macam, sekarang ini dimasukkan menjadi syarat untuk salah satu syarat ... apa namanya ... untuk memperoleh guru besar. Ini sudah dinilai oleh sebuah jurnal dengan review berlapis bisa sampai 3, lalu dianggap layak dimuat oleh jurnal. Lalu kemudian ketika ini masuk di ... apa ... di kementerian, lalu kementerian menunjuk reviewer. Lalu Bapak dalam hal ini menilai lagi hasil review yang sudah di-review oleh sebuah jurnal. Kan begitu yang Bapak lakukan sebetulnya?

39. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:06:44]

Mohon izin, boleh menyampaikan, Yang Mulia?

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:51]

Silakan, silakan.

41. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:06:51]

Jadi tugas review di jurnal, di editor jurnal dengan review di tim penilai, ini berbeda, Yang Mulia, ya. Jadi untuk ke ini ... reviewer yang ada di ini ... apa ... di jurnal, ini kan untuk publikasi. Dan untuk ini ... apa ... review tim penilai, ini kan untuk syarat kenaikan jabatan.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:17]

Ya, bukankah di syarat orang mengajukan guru besar, ya, itu kan dianggap Anda sudah mempublikasikan tulisan di jurnal internasional. Berarti kan, mestinya ... ini kan sekaligus ... apa ... bisa nanti dijelaskan oleh Pak ... apa ... Pak Direktur, artinya kalau sebuah ... apa ... seseorang mengajukan persyaratan menjadi guru besar, lalu sudah ada jurnal internasionalnya yang terindeks, apakah Scopus dan segala macamnya, mestinya kan itu tinggal dicontreng bahwa ini sudah, satu.

Yang kedua, sangat mungkin misalnya ada dispute, ya, soal diskontinu sebuah jurnal yang ter ... apa ... terindeks. Nah, tadi dikatakan ketika ini diajukan dan itu kan pada titik situ sebetulnya jurnal yang bersangkutan sudah tidak terindeks Scopus lagi, itu bisa kita tanya ke Scopus. Jadi, kebetulan saya mengalami, ada satu tulisan yang saya dan beberapa teman masukan ke situ, lama-lama enggak muncul juga di Scopus. Padahal ini kita tahu jurnalnya terindeks Q2 di Scopus, lalu karena kita ... saya mau itu ada di list-nya Scopus, ditanya, dijawab oleh Scopus bahwa tulisan Anda ini terlalu dekat jarak pemuatannya dengan status diskontinu. Nah, itu penjelasan Scopus ke saya. Artinya apa? Kalau sebuah tulisan jarak antara diskontinu dengan penguatan itu cukup panjang, itu akan masih masuk ke list yang terindeks Scopus. Kebetulan saya ini lagi cek ini, nama yang bersangkutan di ... apa ... di Scopus. Tapi karena ada beberapa tulisan belum saya temukan, belum saya cek dengan sebenarnya.

Nah, ini ada dua soal yang harus dijelaskan oleh reviewer terkait dengan hal ini, apakah anda melihat, apakah Prof. melihat itu bahwa ini sudah tidak terindeks sekali, sekaligus itu karena tahunnya atau karena dia berdekatan? Kalau keterangan Scopus ke saya, ini jarak antara tulisan dimuat dengan status diskontinu sangat dekat katanya, sehingga tulisan Anda yang dimuat di jurnal itu tidak masuk list yang terindeks Scopus lagi di Scopus katanya? Nah, mohon ini dijelaskan juga, satu.

Soal tadi reviewer yang ditunjuk kementerian me-review ulang, padahal sepanjang yang saya ketahui syarat itu kan dikatakan, pernah tulisannya dipublikasikan di jurnal internasional yang terindeks atau yang bereputasi. Artinya kan, sebetulnya kalau sudah ada itu kan tinggal contreng, tidak lagi menilai, "Oh ini salah penulisan ... apa ... penulisan catatan kakinya, model ini, dan segala macamnya. Ini direferensinya ada nama bukunya, tapi di catatan kakinya tidak ada," itu kan tidak

kewenangan kita lagi menilainya. Karena itu sudah menjadi otoritas jurnal yang bersangkutan.

Nah, tolong ini di ... di ... diberi penjelasan karena saya kira pasti banyak juga yang mengikuti persidangan ini. Terima kasih.

43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:10:39]

Ada tambahan sedikit (...)

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:10:44]

Terima kasih (...)

45. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:10:47]

Sebentar, Saudara Saksi! Ada tambahan sedikit, ini penegasan saja.

Kalau Saksi mengatakan bahwa dua hal yang berbeda. Tadi pertama persyaratan dimuat jurnal internasional, lalu yang kedua itu adalah persyaratan untuk memperoleh angka kredit yang dilakukan oleh ... apa namanya ... tim reviewer yang ditunjuk tadi yang ada tiga orang.

Nah, saya ingin ketegasan dari Bapak, kalau ternyata jurnal yang sudah dimuat di ... apa ... tulisan yang sudah dimuat di jurnal yang terindikasi ... apa ... Scopus, lalu masih harus diperiksa. Nah, pertanyaannya adalah apa gunanya mensyaratkan untuk dimuat di jurnal internasional? Padahal sebenarnya yang paling menentukan itu adalah hasil tim reviewer yang ditunjuk oleh Dikti.

Nah, tolong diberi ... apa namanya ... diberi klarifikasi atau diberi jawaban yang singkat saja bahwa ya sebenarnya tanpa ... kalau memang harus membutuhkan atau yang menentukan itu adalah tim reviewer, untuk apa disyaratkan dimuat di Scopus? Nah, mohon ... apa namanya... jawaban yang ndak usah terlalu panjang, Pak, singkat saja jawabannya.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:23]

Ya, silakan, Prof!

47. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:12:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin menjawab. Sebelum melanjutkan jawaban dari Kuasa Pemohon. Yang pertama, berkaitan dengan kenapa mesti harus di-review lagi? Jadi, syaratnya adalah artikel jurnal internasional bereputasi. Nah, ketentuan mengenai artikel jurnal ... jurnal internasional bereputasi ini kan dijelaskan pada POPAK 2014, yaitu harus memenuhi syarat jurnalnya yang baik, kemudian karya ilmiahnya

juga baik. Nah, ini pada beberapa kasus, kenapa juga Scopus mesti harus mediskontinu atau cancel? Nah, ini memang banyak sekali ditemukan data atau fakta jurnal yang sudah terindeks Scopus, ya, praktiknya banyak sekali ini ... apa ... melakukan penerbitan yang di luar kriteria ketentuan yang sebagai jurnal atau di dalam pengelolaan jurnal yang baik ini. Jadi, harus memenuhi karya ilmiahnya, harus sesuai dengan kriteria karya ilmiah yang baik, kemudian jurnalnya harus terindeks.

Kemudian, kenapa juga masih banyak jurnal yang masih ini ... apa ... sudah dinyatakan diskontinu, ada yang di ... ini masih terindeks Scopus? Nah, yang dipakai itu biasanya adalah informasi dari Scopus dalam bentuk e-mail berkaitan ini ... apa ... berkaitan status ataupun status yang dinyatakan di laman web-nya, apakah masih terindeks, atau tidak, atau biasanya dalam excel dalam bentuk apakah jurnalnya masih ini ... apa ... terindeks atau tidak, ya. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:31]

Ya, baik.

Selanjutnya, Pak Dr. Muhammad Sofwan, silakan!

49. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:14:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, pertama menjawab pertanyaan dari Pihak Presiden. Ada beberapa pertanyaan, kami jelaskan mungkin secara beruntun. Sebagaimana kami sampaikan bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 mengajukan gugatan ke PTUN atas usulan kenaikan jabatan fungsional guru besar atas nama Pemohon. Gugatan TUN tersebut sudah diputus dengan putusan sebagai berikut.

Satu, putusan pada tingkat pertama, menolak gugatan penggugat. Putusan pada tingkat banding, menguatkan putusan tingkat pertama. Putusan pada tingkat kasasi, menolak permohonan kasasi penggugat atau Pemohon.

Selain mengajukan gugatan TUN, Pemohon juga mengajukan gugatan perdata yang telah diputus, sebagai berikut.

Putusan tingkat pertama menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Putusan tingkat banding, menguatkan putusan tingkat pertama. Dan sampai hari ini, kami belum menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa penggugat mengajukan upaya hukum kasasi atau tidak.

Berikutnya pada tahun 2019, Tim PAK diangkat berdasarkan Keputusan Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristek Dikti Nomor 210 Tahun 2019 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Tahun 2019 dengan keputusan tersebut. Dan juga ada Keputusan Nomor 209

tentang Tim Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen berjumlah 78 orang. Jadi ada tim penilai, ada tim validasi. Tim penilai pertama, jadi setiap guru besar itu dinilai 2 kali. Pertama, oleh tim besar atau tim penilai, kemudian divalidasi oleh tim kecil.

Tahun 2021, Tim PAK Pusat diangkat berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 33 tentang Tim Validasi Penilaian Angka Kredit Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berjumlah 125 orang, ditambah ada tim validasi internal di administrasi dari direktorat.

Tugas tim penilai, ini tim penilai pusat, ya, di Dirjen Dikti adalah:

1. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan tentang penilaian angka kredit jabatan akademik dosen.
2. Menyusun pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan akademik dosen. Dan,
3. Menyusun laporan pelaksanaan penilaian jabatan akademik dosen.

Nah, di dalam proses penilaian karya ilmiah Pemohon, di dalam mengangkat, Ditjen Dikti memperhatikan persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi Tim PAK berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013. Pertama, menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat dosen yang dinilai. Yang kedua, memiliki keahlian serta mampu menilai prestasi kerja dosen. Yang ketiga, dapat melakukan penilaian angka kredit dosen.

Tim PAK yang melakukan penilaian terhadap karya ilmiah Pemohon telah memenuhi persyaratan tersebut. Para penilai karya ilmiah Pemohon mempunyai pengalaman di bidang pendidikan yang seluruhnya profesor dan memiliki pengalaman melakukan penilaian angka kredit terhadap jabatan akademik. Terkait dengan penilaian karya ilmiah Pemohon, tim penilai karya ilmiah memiliki ruang lingkup latar belakang berkenaan dengan rumpun ilmu yang (suara tidak terdengar jelas) Pemohon. Tadi sudah dijelaskan banyak. Sehingga penilaian karya ilmiah dapat dilakukan oleh penilai yang memiliki monodisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan multidisiplin yang berkenaan dengan rumpun ilmu karya ilmiah yang dinilainya.

Berikutnya, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa pengusulan Pemohon sebagai guru besar oleh Universitas Indonesia diajukan 27 hari menjelang Pemohon pensiun. Dirjen Dikti telah melakukan penilaian dalam waktu 16 hari saja dari target maksimal 55 hari kerja dari sejak usulan diterima. Akan tetapi, hasil penilaian karya ilmiah Pemohon dinyatakan oleh tim penilai, baik reviewer 1, reviewer 2, maupun reviewer 3 menyatakan perlu perbaikan atau dalam laman disebutkan ditolak. Sehingga terhadap hasil penilaian angka kredit

Pemohon yang telah dilakukan oleh 3 orang reviewer menyatakan bahwa karya ilmiah belum memenuhi kriteria jurnal internasional dan harus diperbaiki.

Nah, terkait dengan pertanyaan kenapa ada tingkat di tata kelola kami, ketika seseorang usulannya ditolak khusus profesor, itu melakukan 2 hal. Pertama, mengajukan audiensi oleh universitasnya. Kemudian, setelah tidak dicapai kesepakatan, juga bisa dilakukan banding dan kami siapkan tim komisi banding.

Oleh karena itu, Pemohon ... oleh karena itu, pada tanggal 5 Maret 2020, Dirjen Dikti melakukan audensi. Itu kami yang mengundang. Tidak atas ... tidak atas usul universitas, tapi atas usul direktorat sumber daya. Menawarkan solusi agar Pemohon mendapatkan jalan keluar, dapat diangkat menjadi profesor, tetapi dengan status NIDK karena sudah melewati batas usia pensiun. Tetapi dengan catatan, ini mohon sekalian klarifikasi, bukan diberi, diberi kesempatan, bukan diberi guru besar, tapi diberi kesempatan mengajukan NIDK dengan perbaikan publikasi ilmiah baru. Sehingga, nanti akan dinilai lagi dan statusnya diperpanjang sampai dengan 5 tahun. Akan tetapi, sampai dengan diajukannya gugatan ke PTUN maupun perdata, tidak ada upaya perbaikan atau penyempurnaan usulan dan persyaratan dari Pemohon melalui Universitas Indonesia dan Pemohon juga sudah memasuki batas usia pensiun terhadap ... maaf, terhitung mulai tanggal 1 November 2019. Maka, Dirjen Dikti tidak dapat meneruskan usulan penggugat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi profesor atau guru besar.

Nah, berdasarkan data yang ada pada kami di direktorat sumber daya pada sekitar tahun 2016 sampai tahun 2021, ada 7 usulan guru besar yang sudah disetujui dari Universitas Indonesia. Pertama, Dr. Ivandini Anggraningrum, bidangnya kimia, Nomor Usul 1383, tanggal usul 2 ... 11 November 2016, dan ditetapkan jabatan fungsionalnya guru besarnya 1 November 2018. Yang kedua, Prof. Jatna Supriatna, bidangnya biologi konservasi, Usulnya 5954, tahun 2016, diusulkan pada tanggal 19 Agustus 2016, dan ditetapkan sebagai guru besar pada tanggal 1 September 2016. Ini artinya yang di bawah SOP, ya, lebih cepat dari SOP. Nomor 3, Dr. Drs. Wibowo Mangunwardoyo, bidangnya biologi, Usulnya 1615, diusulkan 27 Desember 2016, ditetapkan 1 Maret 2017. Kemudian, ada lagi Dr. Yoki Yulizar, bidangnya kimia, Usul 547, pada tanggal 18 April 2017, ditetapkan 1 November 2018. Kemudian yang berikutnya, Dr. Abdul Haris, S.Si., M.Si., bidangnya geofisika, Usul 2297, tanggal 28 Desember 2018, dan ditetapkan tanggal 1 Juni 2019. Yang berikutnya, Dr. Azwar Manaf, bidang ilmu material, Nomor Usul 805 (suara tidak terdengar jelas) Maret 2020, ditetapkan 1 Juli 2020. Dan terakhir, Dr. Joko Triyono, bidangnya fisika, nomor urut ... Nomor Usul 1197, tanggal 19 Mei 2021, dan ditetapkan 1 Agustus 2021.

Nah, ini beberapa contoh dosen tadi yang dari ... kebetulan sama-sama dari UI dan bidang ... dari fakultas yang sama dengan Pemohon dan sudah ditetapkan guru besarnya. Khusus untuk Prof. Jatna, karya ilmiahnya sudah memenuhi ... dianggap memenuhi syarat sebelum beliau pensiun, sehingga usulannya dapat diteruskan, diproses, dan ditetapkan sebagai guru besar.

Sekali lagi saya sampaikan, Yang Mulia, Pemohon mengajukan usulan 27 hari menjelang pensiun. Nah, ini atas dasar kris ... diskresi dan kebijakan dari Dirjen Dikti, tetap dilakukan penilaian meskipun tidak sesuai dengan surat edaran. Hanya saja penilaian angka kredit belum memenuhi kecukupan angka, sehingga memenuhi kriteria syarat khusus. Sehingga angka kredit Pemohon tidak bisa diteruskan.

Pada saat penilai melakukan pengecekan, posisi hanya ... posisi karya ilmiah memang status cancel menurut reviewer, menurut reviewer. Karena secara substansi seluruh penilaian substansi dan kredibilitas jurnal maupun tulisan dilakukan oleh reviewer yang diangkat oleh Dirjen Dikti.

Nah, selanjutnya terkait dengan beberapa pertanyaan dari Pemohon. Proses penilaian PAK telah dirinci oleh pengadilan PTUN dan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga menurut saya tidak perlu dijawab, ya. Karena sudah ... tapi namun demikian (...)

50. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:25:24]

Saya potong sedikit. Saudara ... Saudara Saksi, ya. Tadi Saudara menyampaikan ada yang di bawahnya standar operasional, ada standar operasional sekian hari setelah masuk sampai keluarnya SK.

51. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:25:40]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:25:41]

Apakah di tempat Saudara ada data yang bisa menggambarkan berapa banyak yang sesuai dengan SOP? Berapa banyak yang lebih cepat dari SOP? Dan berapa banyak yang tidak sesuai dengan SOP dalam arti lewati tenggang waktu yang ditentukan di SOP? Ini penting saya tanyakan, Pak (...)

53. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:26:16]

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:26:17]

Karena Bapak tadi mengatakan ada diskresi. Nah, diskresi ini yang seringkali menimbulkan hal-hal yang bisa membuat orang menafsir macam-macam terhadap apa yang dilakukan oleh departemen. Kami juga punya data-data, ada yang sampai tahunan permohonannya masuk dan tidak keluar-keluar, gitu.

Nah, ini tolong kalau ada datanya disampaikan itu, sehingga kita bisa melihat, jangan-jangan ini ada persoalan suka dan tidak suka. Saya mohon maaf kalau saya agak ngomong terbuka, gitu.

55. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:27:03]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:27:04]

Kalau ada yang dikenal di dalam, cepat banget. Tapi kalau ndak dikenal, itu bisa bertahun-tahun. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan di sana. Kalau perlu, jangan ada diskresi. Harus konsisten saja dengan aturan. Untuk apa Bapak menerima permohonan yang sudah jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan masa pensiun tadi? Lalu kemudian diproses dan kemudian juga itu kan memberikan harapan-harapan-harapan palsu saja, PHP saja.

Nah, termasuk yang tadi Bapak Sutikno, Pak Sutikno tadi ada ada tambahan sedikit, Prof. Saya misalnya orang hukum, di Indonesia banyak jurnal-jurnal yang sangat kredibilitas ... kredibilitasnya sangat tinggi, misalnya jurnal di Mahkamah Konstitusi yang memuat tulisan-tulisan hukum. Nah, kenapa harus membedakan antara perlakuan jurnal yang ada di negara kita dengan jurnal-jurnal yang harus terindeks Scopus tadi? Padahal ujung-ujungnya juga yang menentukan adalah penilai-penilai dari kita, gitu? Ini kan sama saja dengan ... apa namanya ... mengada-ngada saja, harus jurnal internasional, tapi isinya nanti ditentukan lagi, gitu. Nah, kenapa enggak jurnal ... semua jurnal saja? Boleh jurnal internasional, boleh jurnal yang nasional, toh juga nanti akan dikoreksi kembali, gitu, Prof.

Nah saya kira ini perlu, kami di sini juga ... ya, kita pernah mengalami, kita juga sudah melalui proses-proses itu, sehingga memperoleh gelar guru besar dan memang sangat banyak informasi-informasi yang saya tidak tahu, saya tidak bisa menjamin kebenarannya, tapi informasi-informasi seperti itu tadi. Ada yang lama betul enggak keluar-keluar, ada yang sangat singkat keluar. Kita tidak bisa ... apa namanya ... menuduh, tetapi informasi-informasi yang berseliweran di luar itu bahwa wah, ini karena ada yang dikenal di sana.

Ini ... ini saya kira, Pak, ini perlu dilakukan ini demi kita semua, demi kita semua. Harus ada kejelasan, kita salut kalau di departemen betul-betul untuk menjaga kualitas, menjaga kualitas, kita juga tidak boleh loose di situ, tetapi kita mau harus ada konsistensi itu. Harus ada konsistensi, tidak ada ruang yang bisa ditafsirkan macam-macam oleh orang lain. Sehingga kalau perlu, ya, sudah enggak usah ada diskresi, pokoknya aturannya begini, sudah selesai ,gitu.

Saya kira itu, Pak, Prof. Mohon maaf kalau saya agak-agak vulgar karena saya juga mengalami banyak hal seperti itu ketika saya jadi dekan, bahkan ada kawan saya, ada sumber daya kami ketika saya jadi dekan sudah masuk permohonannya, itu kurang-lebih 8 tahun yang lalu, sampai sekarang enggak pernah keluar.

Nah, saya masih ingat ketika itu zamannya Pak Joko jadi dirjen. Bahkan saya mendampingi rektor saya menemui pak dirjen karena katanya jurnalnya ada masalah. Padahal jurnal itu sudah banyak yang dipakai dan berhasil menjadi guru besar. Nah, ini hal-hal seperti ini, Pak, yang bisa menimbulkan, menimbulkan ... apa ... kecurigaan-kecurigaan yang kemudian bisa menjadi su'udzon atau lain-lain, dan kemudian berpengaruh pada kualitas departemen.

Itu, mohon maaf, Pak Prof, Pak Muhammad Sofwan. Kami sebenarnya berharap ada data, termasuk data mungkin kalau bisa, berapa banyak jurnal ... apa namanya ... jurnal yang bereputasi internasional terindeks Scopus misalnya di bidang hukum berapa, di bidang ini berapa. Apakah ada keseimbangan antara jumlah sumber daya yang akan mengusulkan guru besar dengan jumlah jurnal internasional yang terindeks Scopus misalnya?

Kita bisa bayangkan kalau misalnya 500 yang mengusulkan jadi guru besar, lalu kemudian persyaratannya ketat harus jurnal Scopus, kemudian jurnal Scopusnya hanya sekian banyak, ini orang antri, Pak, terutama kami dari ilmu sosial. Saya tahu persis kalau eksakta masih lumayan jumlah apa ... jumlah jurnal yang terindeks Scopus itu, tetapi jurusan-jurusan noneksakta itu jumlahnya sangat sedikit, Pak, yang terindeks. Nah, apakah ini tidak sama dengan menghambat saja? Atau memang ada keinginan untuk menghambat? Nah, ini tolong, tolong diklikir ini, Pak supaya sekali lagi jangan ada dusta di antara kita.

Saya kembalikan ke Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:32:45]

Ya, baik, terima kasih. Silakan, siapa lanjutan dari Pak Muhammad Sofwan, baru nanti kalau ada tambahan untuk Prof. Sutikno, silakan!

58. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:32:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan SOP, kami punya data yang disetujui sesuai dengan SOP dari ... yang kami data ada 2018-2021 akhir. Untuk lektor kepala yang tak sesuai standar langsung sesuai standar itu 1.181. Sedangkan untuk guru besar yang langsung disetujui sesuai SOP=1.228. Berikutnya, sisanya adalah biasanya yang ditolak atau yang perlu perbaikan. Jadi, yang seperti tadi disebutkan bertahun-tahun, bahkan mungkin ada 2 tahun karena berkali-kali juga ditolak, tetapi kami pernah saya ... seperti kami sampaikan bahwa kami mempunyai tiga tahap di saat setelah penilaian. Kalau tiga kali ditolak biasanya ada usulan dari rektor atau kami berinisiasi, biasanya rektor yang mengajukan untuk dilakukan audiensi, mencari solusi. Kalau di dalam audiensi belum juga ditemukan solusi di antara pemohon dan reviewer, maka pemohon atau pengusul boleh mengajukan banding ke komisi banding yang diketuai oleh pak dirjen. Nah, di komisi banding itulah yang menetapkan dia lolos atau tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pak dirjen.

Terkait dengan diskresi, sebetulnya karena surat edaran dirjen SDID saat itu baru berupa himbauan, sedangkan pelaksanaannya sejak 1 Januari 2021. Jadi, himbauan 2 tahun sebelum pensiun itu yang tertuang dalam edaran, oleh karena itu atas dan sebenarnya yang diberi diskresi tidak hanya Pemohon, tetapi beberapa dosen yang mau pensiun karena belum mengubah kewajiban, sehingga tetap dilakukan penilaian atas persetujuan dari dirjen dikti dan beberapa berhasil, beberapa juga tidak berhasil. Nah, untuk data yang lebih detail insya Allah nanti kami sampaikan, termasuk data jurnal bereputasi Scopus yang akan kami bekerjasama dengan reviewer.

Untuk peningkatan layanan sebagaimana disarankan oleh Pak Yang Mulia Hakim, kami saat ini sejak 2020 akhir, ya, itu sudah menerbitkan kebijakan namanya Selancar PAK, sehingga setiap pengusul bisa memantau progress real time usulannya sampai di mana, sehingga dia bisa ... bisa mengetahui yang disetujui atau ditolak dan ditolaknya kenapa, gitu. Tetapi untuk alasan detail, kami sampaikan kepada institusi bukan kepada perorangan, sedangkan yang perorangan bisa mengetahui statusnya, status progress, termasuk bisa di-download melalui Android. Demikian, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:48]

Baik. Prof. Sutikno ada tambahan atau cukup?

60. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUTIKNO [01:35:54]

Ya, mohon izin, Yang Mulia, untuk menambahkan.

Jadi, ya, setahu kami dengan adanya kebijakan apa Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 juncto Nomor 46 Tahun 2013, dimana salah satu syarat untuk kenaikan jabatan fungsional profesor adalah memiliki satu artikel jurnal bereputasi. Kalau kita bandingkan dengan sebelum penerapan ini, kebijakan ini, dimana kita dulu misalkan publikasinya itu di peringkat internasional, terutama dari data-data based internasional apakah Scopus atau web of science itu rendah sekali, ya, kalau kita banding misalkan dengan Malaysia atau Singapura kita itu grafiknya itu landau. Kemudian kalau kita lihat sekarang itu kita sudah sudah relatif jauh lebih baik dibanding dengan kondisi sebelum penerapan implementasi itu, ya. Jadi kalau kita melihat memang ada peningkatan yang cukup signifikan, terutama reputasi internasional berkaitan dengan publikasi ilmiah.

Kemudian yang kedua ini juga memotivasi-memotivasi kolega-kolega dosen di beberapa perguruan tinggi dimana sekarang itu jurnal kita di dalam negeri yang terindeks Scopus itu sudah kalau tidak salah sudah sekitar ratusan atau bahkan lebih dari kemarin yang coba saya ini apa ... list itu sudah mencapai 100-an. Ini tentunya sebuah capaian yang luar biasa dimana oleh apa ... akademik ... akademisi kita itu sudah mulai mempublikasikan di jurnal-jurnal yang bagus dan jurnal kita sendiri juga sudah bisa disejajarkan dengan jurnal-jurnal lain dari sisi indeksasi ke Scopus, ya.

Kemudian banyak juga ini apa ... jurnal-jurnal seperti di bidang hukum, ya, di bidang hukum. Setahu kami ya kalau ini tidak salah, mohon maaf, jadi di MK sendiri nampaknya punya sekarang punya jurnal yang terindeks Scopus, ini saya pikir merupakan ini juga kebahagiaan, termasuk saya sebagai akademisi, dimana jurnal-jurnal kita bukan hanya di bidang science technology, tapi di bidang-bidang yang seperti ilmu sosial dan humaniora bahkan yang bermuatan lokal (local indigenous) itu banyak disukai juga oleh ini apa ... peneliti-peneliti atau akademisi di luar negeri. Jadi pada saat kami dulu menjadi Kepala PT Perpustakaan itu banyak sekali permintaan ini apa ... dari perpustakaan diapa ... di Amerika ini meminta ke perpustakaan di kita untuk mengirimkan jurnal-jurnal kita, terutama yang muatannya lokal, kita itu ada 1 jurnal yang terindeks Scopus di bidang seni, ya, di bidang seni ini saya pikir dengan kita mendorong ini pengelolaan jurnal untuk bisa apa ... terindeks pada database internasional, bisa tampil di sana, dan bisa diakses oleh ini apa ... reader atau pembaca yang lebih luas ini tentunya akan memberikan reputasi yang lebih baik pada akademisi kita. Terima kasih, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:39:23]

Ada sedikit untuk Pak Muhammad Sofwan. Pak Saksi, Pak Dr. Muhammad Sofwan dengar?

62. SAKSI DARI PEMERINTAH: M. SOFWAN EFFENDI [01:39:38]

Ya, siap Pak. Dengar, siap, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO [01:39:40]

Bisa enggak kami dibantu diberikan perbandingan negara mana saja yang modelnya seperti kita, mensyaratkan jurnal yang bereputasi internasional terindeks Scopus? Tolong di apa ... dibantu kami, negara mana saja yang juga menggunakan model seperti itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Karena Pihak Terkait hari ini tidak hadir, tetapi pada sidang yang lalu, Pihak Terkait akan mengajukan 2 saksi dan 1 ahli. Jadi, nanti Kepaniteraan akan memberitahu kapan sidang selanjutnya, apakah Pihak Terkait mengajukan ... tetap mengajukan dua saksi dan 1 ahli.

Kemudian dari Kuasa Presiden mengajukan bukti tambahan PK-14, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu untuk penundaan sidang, akan diberitahu oleh Kepaniteraan, ya, kapan sidang berikutnya. Sambil Kepaniteraan memberitahu kepada Pihak Terkait dan menanyakan sekaligus ... apa ... apakah akan tetap mengajukan saksi dan ahli.

Kemudian untuk kedua Saksi, terima kasih atas keterangannya.

Kemudian, tadi data-data yang diminta atau tambahan-tambahan apa yang akan disampaikan untuk kedua Saksi, bisa diserahkan melalui Kuasa Presiden. Ya, tolong diperhatikan.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.10 WIB

Jakarta, 10 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001